



# ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT, DAN BERKELANJUTAN



**H. MUZAKIR MANAF**  
Calon Gubernur Aceh

**H. FADHLULLAH, SE**  
Calon Wakil Gubernur Aceh



**H. MUZAKIR MANAF**  
Calon Gubernur Aceh



**H. FADHLULLAH, SE**  
Calon Wakil Gubernur Aceh

**ACEH ISLAMI,  
MAJU, BERMARTABAT,  
DAN BERKELANJUTAN**

# PRAKATA

## *Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala iradah-Nya kita masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sehat dan penuh hidayah. Shalawat beriring salam kita sanjung-sajikan ke pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW selaku suri tauladan segenap umat, dimana berkat perjuangan-Nya kita dapat hidup dalam dunia yang penuh dengan nilai-nilai peradaban saat ini.

Adalah fakta bahwa perjuangan menegakkan keadilan upaya semua bangsa di atas permukaan bumi ini. Begitu juga Aceh yang pernah dan sedang dalam upaya menghadirkan rasa keadilan untuk seluruh anak bangsanya. Sejarah mencatat bahwa Aceh pernah meraih zaman keemasan di bidang ekonomi, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda.

Hari ini Aceh dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Letak geografisnya sangat strategis diantara Samudera Hindia dan Selat Malaka, disamping juga dianugerahi sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Sayangnya, semua potensi ini belum dikelola secara optimal dan masih menyisakan berbagai persoalan hingga saat ini sehingga belum mampu menyejahterakan Rakyat Aceh.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang lebih dikenal dengan UUPA, merupakan manifestasi dari kesepakatan damai antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki. Kondisi ini memberi peluang besar untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi Rakyat Aceh. UUPA yang muatannya sesuai dengan MoU Helsinki menjadi pondasi penting bagi terlaksananya proses pembangunan dan terselenggaranya Pemerintahan Aceh secara

optimal.

Belum optimalnya pelaksanaan UUPA sebagai produk perundang-undangan, termasuk produk hukum turunannya telah berimplikasi luas, terutama terbatasnya kewenangan yang seharusnya dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam merealisasikan harapan tersebut.

Adanya UUPA seharusnya dapat menginspirasi dan menumbuhkan semangat baru bagi Rakyat Aceh, terutama dalam menata kehidupan pasca usainya konflik dan bencana dahsyat Tsunami, menuju kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan oleh para pejuang Aceh tempo dulu. Kesejahteraan itu pula menjadi salah satu esensi penting yang menjadi kunci pemelihara dan penguat keabadian perdamaian Aceh. Masih banyaknya turunan aturan pelaksanaan UUPA yang belum dituntaskan hingga saat ini dirisaukan dapat mengganggu keberlanjutan proses pembangunan dan perdamaian Aceh ke depan.

Mengutip amanah Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh ke VIII, Allahyarham Dr. Tgk Hasan Muhammad Ditiro, yaitu *“Di masa perang kita telah banyak berkorban, akan tetapi dalam masa damai kita harus bersedia berkorban lebih banyak lagi. Memang biaya perang sangat mahal, akan tetapi biaya memelihara perdamaian jauh lebih mahal. Peliharalah kedamaian ini untuk kesejahteraan kita semua.”*

Beban dan tanggungjawab moral inilah sebenarnya yang menjadi dasar bagi kami, **H. Muzakir Manaf** dan **H. Fadhlullah, SE** untuk maju dan mencalonkan diri pada **Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024** selaku pasangan **Calon Gubernur Aceh dan Calon Wakil Gubernur Aceh** Periode 2024-2029. Kehadiran kami ini semata-mata demi mengabdikan diri bagi kemajuan dan kesejahteraan Aceh. Dasar itu pula yang menjadi spirit luar biasa bagi kami untuk merealisasikan harapan Rakyat Aceh dan cita-cita mulia para endatu dan syuhada kita terdahulu.

Berbagai persoalan yang ada, termasuk tantangan-tantangan yang akan kita hadapi sejalan dengan dinamika lingkungan strategis di tingkat nasional, regional dan international. Hal ini merupakan pekerjaan rumah dan tanggung jawab yang akan kami perjuangkan selaku Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Aceh. Pasangan kami, H. Muzakir Manaf dan H. Fadhlullah, SE yang diusung oleh Partai Aceh, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nanggroe Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Serikat Indonesia, Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Gabthat, dan Partai Hanura, telah berkomitmen untuk menjalankan amanah dan tanggung-jawab dalam menyelenggarakan proses pembangunan daerah ini melalui implementasi

program-program pembangunan yang sesuai kebutuhan Rakyat Aceh.

Komitmen ini telah kami nyatakan dalam bentuk Visi-Misi, yaitu **“Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.”** Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan secara sistematis ke dalam misi yang terdiri dari 6 (enam) Bidang Pembangunan: yaitu Agama, Ekonomi, Infrastruktur, Sosial Budaya, Klaster Pemerintahan Politik dan Hukum, dan Lingkungan Hidup .

Misi-misi tersebut lalu dituangkan ke dalam beberapa beberapa isu strategis dan program prioritas pembangunan Aceh sebagaimana disajikan secara lengkap dalam dokumen ini.

Harapan kami dan tentunya juga harapan kita semua, Pilkada Aceh tahun 2024 ini akan terselenggara dengan baik dan sukses., Visi-misi kami sebagai sasaran agung pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat diwujudkan secara nyata melalui implementasi strategi dan program-program prioritas pembangunan yang telah dirancang dalam dokumen ini. Kami juga berharap agar semua pihak dapat memberi dukungan moril agar proses pembangunan dalam mewujudkan cita-cita dan menjalankan tugas-amanah mulia ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Kami menghaturkan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota dari seluruh partai-partai pengusung, yang telah dan tetap berkomitmen mendukung pasangan kami untuk berpartisipasi dalam Pilkada Aceh Tahun 2024. Terima kasih juga kepada para pihak, baik unsur yang ada di Tim Pemenangan Aceh, Mualem Center dan Tim Pemenangan Lintas Partai Politik, dan seluruh Relawan Mualem–Fadhullah yang telah bekerja secara ikhlas dan penuh dedikasi dalam proses ini. Wa bil khusus, apresiasi kami yang tinggi kepada Tim Penyusun Visi-Misi dibawah supervisi Dr. Teuku Rasyidin dan kawan-kawan. Semoga Allah SWT memberi balasan pahala atas semua kebaikan ini.

***Wassalaamu ‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

**H. Muzakkir Manaf – H. Fadhullah, SE**

# DAFTAR ISI

PRAKATA	3
DAFTAR ISI	6
PENDAHULUAN	7
NILAI DASAR PEMBANGUNAN ACEH	9
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN ACEH	10
VISI	12
MISI	13
STRATEGI MISI	14
PROGRAM PRIORITAS	19
BIODATA CALON GUBERNUR	33
BIODATA CALON WAKIL GUBERNUR	35

# PENDAHULUAN

Pasangan Perjuangan dan Pembangunan Aceh, Calon Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf dan Calon Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah SE, merancang konsep pembangunan Aceh berpijak pada Nota kesepahaman (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005, yang telah dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan GAM yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, menandakan kilas baru pembangunan Aceh, dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

Karena itu, masa depan Aceh sangat terkait dengan prinsip-prinsip damai, makmur, sejahtera, bermartabat, akuntabilitas, transparansi, dan aturan hukum yang berkeadilan. Terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal.

Prinsip-prinsip pembangunan Aceh tersebut tidak akan terlepas dari tradisi atau model pemerintahan yang baru dalam era globalisasi dan digitalisasi, namun makna pemerintahan sebagai suatu bentuk organisasi yang dinamis dituntut untuk selalu fleksibel dan berubah dalam kondisi tertentu. Inilah yang nantinya akan menjadikan suatu konsep good governance sebagai suatu landasan bagi pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara menyeluruh.

Dalam rangka mewujudkan suatu konsep pemerintahan yang baik, peran pemerintah tidak lagi menjalankan peran secara dominan, namun lebih kepada meningkatkan kontribusi dari tiga pilar negara, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dimana ketiga pilar negara tersebut harus saling bekerja sama dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

Beranjak dari kondisi dan karakteristik lokal Aceh dengan berbagai

permasalahan yang ada saat ini, maka dilakukan analisis potensi sektoral berikut hambatan dan tantangan serta strategi penyelesaiannya. Disadari bahwa kapasitas fiskal Aceh sangat terbatas mengingat ketersediaan Dana Otsus akan berakhir pada tahun 2027. Sebab itu, pasangan Perjuangan dan Pembangunan Aceh ini bertekad dan berkomitmen melakukan berbagai pendekatan agar Dana Otsus Aceh dapat diperpanjang tanpa batas waktu (abadi).

Selain itu, ikhtiar untuk menambah sumber-sumber penerimaan baru, seperti potensi minyak dan gas, tetap dilakukan sehingga kemandirian fiskal Aceh menjadi semakin kuat. Jika ini terwujud maka proses pembangunan Aceh khususnya dalam implementasi program-program pembangunan Aceh akan berjalan sebagaimana yang direncanakan. Pada akhirnya, kesejahteraan rakyat Aceh dapat diwujudkan.

Berdasarkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Aceh saat ini, maka dengan mengharapkan rahmat dan ridha serta ma'unnah Allah Subhanahuwataala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami menetapkan **Visi Pembangunan Aceh tahun 2025–2030** adalah:

***Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.***

# **NILAI DASAR PEMBANGUNAN ACEH**

## **4 (EMPAT) NILAI**

***Mulija Lam Sjari'at Euseulam***  
(Mulia dalam Syari'at Islam)

***Sidjahtra Ngôn Martabat***  
(Sejahtera dan Bermartabat)

***Meu-bahagia Dônja Acherat***  
(Bahagia Dunia dan Akhirat)

***Meu-jum Bak Mata Dônja***  
(Terpandang di Mata Dunia)

# ISU STRATEGIS

## PEMBANGUNAN ACEH

### A. BIDANG AGAMA

1. Pemahaman dan pelaksanaan Syari'at Islam belum optimal yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Syariat Aceh sebesar 82,72 (Aqidah, Ibadah, Akhlak, melek Al- Qur'an).
2. Belum optimalnya pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS).
3. Masih ditemui adanya aliran sesat dalam kehidupan masyarakat.

### B. BIDANG EKONOMI

1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi (dibawah 5 % per thn).
2. Hilirisasi (industri pengolahan) masih rendah (kontribusi dibawah 5 %).
3. Rendahnya Produktivitas pertanian (5,5 ton/ha)
4. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (6,03 %).
5. Tingginya Angka Kemiskinan (14,45 %).
6. Rendahnya Kemandirian Fiskal daerah.
7. Minimnya investasi swasta (Rp 2-3 Triliun per tahun).
8. Rendahnya Kewirausahaan masyarakat (sebesar 1,8 %).
9. Tingginya ketimpangan antar wilayah.

### C. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Infrastruktur dasar untuk pengembangan ekonomi daerah, termasuk ekonomi kreatif seperti jalan, jaringan listrik, sanitasi, dan fasilitas komunikasi belum sepenuhnya memadai.
2. Kondisi kemantapan jalan sekitar 84 persen.
3. Prasarana jalan usahatani ke kawasan-kawasan sentra produksi pertanian belum baik.
4. Pemanfaatan pelabuhan laut belum optimal.
5. Konektivitas sarana perhubungan antarwilayah belum terintegrasi secara utuh.
6. Akses penduduk terhadap air layak minum belum sepenuhnya terjamin.

### D. BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

1. Kualitas dan daya saing Sumberdaya Manusia masih rendah dengan IPM Aceh sebesar 74,70% .

2. Akses dan kualitas layanan Kesehatan masih rendah.
3. Angka stunting masih tinggi (29,4%).
4. Akses dan kualitas layanan Pendidikan Umum belum optimal.
5. Kualitas Pendidikan Vokasi masih rendah.
6. Kesetaraan gender dalam proses aktivitas pembangunan daerah masih terbatas.
7. Kurangnya perawatan atau pemeliharaan terhadap situs-situs peninggalan sejarah.
8. Pembinaan peran kelembagaan adat dan perangkatnya masih terbatas.
9. Penetrasi budaya dan nilai-nilai asing makin tinggi.

#### **E. BIDANG PEMERINTAHAN, POLITIK, DAN HUKUM**

1. Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya Good Governance dan Clean Government.
2. Kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat belum optimal yang ditandai dengan Indeks Pelayanan Publik sekitar 4.01.
3. Penerapan electronic system dalam tata Kelola pemerintahan daerah belum optimal.
4. Implementasi Hukum belum terlaksana dengan baik.
5. Partisipasi kaum perempuan dalam bidang politik masih terbatas.

#### **F. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

1. Rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Aceh (sekitar 78,29).
2. Adanya daerah rawan pangan dan rawan bencana banjir yang ditandai dengan tingginya Indeks Risiko Bencana Aceh (149.1).
3. Pemanfaatan ruang belum sesuai RTRW.
4. Pemanfaatan SDA belum berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
5. Fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas perambahan hutan belum berjalan efektif.

#### **G. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

1. Rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Aceh (sekitar 78,29).
2. Adanya daerah rawan pangan dan rawan bencana banjir yang ditandai dengan tingginya Indeks Risiko Bencana Aceh (149.1).
3. Pemanfaatan ruang belum sesuai RTRW.
4. Pemanfaatan SDA belum berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
5. Fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas perambahan hutan belum berjalan efektif.

# VISI

## **ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT, DAN BERKELANJUTAN**

### **ISLAMI**

“Dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh menjalankan aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan berlandaskan Syariat Islam.”

### **MAJU**

“Dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh telah mencapai tingkat peradaban dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi”

### **BERMARTABAT**

“Dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh yang religius, memiliki harga diri, peradaban, pengetahuan, dan kepercayaan yang tinggi sebagai sebuah bangsa”

### **BERKELANJUTAN**

“Dimaknai sebagai suatu kondisi dimana proses pembangunan daerah dan aktivitas kehidupan masyarakat berlangsung harmoni dengan kondisi lingkungan hidup yang tetap lestari.”

# MISI

1. Menjalankan Syari'at Islam dalam Kehidupan Masyarakat secara Kaffah
2. Mewujudkan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA
3. Melaksanakan Kemandirian Ekonomi Aceh dengan Berbasis pada Sektor Unggulan Aceh
4. Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Menjamin Konektivitas Antarwilayah
5. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
6. Mengoptimalkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Aceh `serta Membina Stabilitas Politik dan Implementasi Hukum
7. Memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ekosistemnya

# STRATEGI MISI

## MISI 1 MENJALANKAN SYARI'AT ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SECARA KAFFAH

### **Strategi:**

1. Meningkatkan syiar Islam melalui aktivitas dakwah yang intensif guna memantapkan pemahaman dan amalan Syari'at Islam di tengah kehidupan masyarakat.
2. Membangun komunikasi yang intensif antar sesama Ulama dan Tokoh Masyarakat guna memperkuat sinerjitas dalam pembinaan ummat.
3. Memperkuat pengawasan kehidupan keagamaan dengan berprinsip pada pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat
4. Mengantisipasi dan mencegah munculnya aliran-aliran sesat yang dapat mengganggu dan merusak syiar dan amalan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.

## MISI 2 MEWUJUDKAN IMPLEMENTASI KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN ACEH SESUAI MOU HELSINKI DAN UUPA

### **Strategi:**

1. Memperteguh komitmen para pihak untuk menyelesaikan turunan produk-produk hukum/regulasi dari UUPA dan mengawal proses implementasinya
2. Meningkatkan intensitas komunikasi politik dengan pemerintah pusat dan re-koordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam penandatanganan MoU Helsinki.
3. Mengembalikan kejayaan peradaban Aceh sesuai entitas ke-Acehan serta menjalin hubungan kerjasama bidang pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi di tingkat nasional dan global.
4. Melestarikan situs-situs budaya yang bernilai sejarah.

5. Memperkuat pemahaman dan implementasi butir-butir UUPA dalam proses pembangunan Aceh serta menjaga keharmonisan antar-stakeholders dan seluruh elemen masyarakat demi keabadian perdamaian di Aceh

### **MISI 3**

#### **MELAKSANAKAN KEMANDIRIAN EKONOMI ACEH DENGAN BERBASIS PADA SEKTOR UNGGULAN ACEH**

##### ***Strategi:***

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong Hilirisasi untuk penguatan struktur ekonomi daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas lahan produktif dan pemanfaatan lahan-lahan terlantar disertai penyediaan input, sarana produksi, dan mekanisasi untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil-hasil pertanian.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usahatani dan memberdayakan kelembagaan petani/nelayan.
4. Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.
5. Mendorong iklim perbankan berbasis Syari'ah yang mendukung pembiayaan untuk pengembangan usaha di sektor rill serta pelaku usaha kecil dan mikro (UKM).
6. Meningkatkan hubungan kemitraan yang kuat antara pemerintah
7. daerah, swasta, dan asosiasi pelaku ekonomi di daerah.
8. Membangun iklim dunia usaha dan iklim investasi yang kondusif yang mampu mendorong minat para pemilik modal (investor) mengembangkan usaha dan berinvestasi di Aceh.

### **MISI 4**

#### **MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN MENJAMIN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH**

##### ***Strategi:***

1. Membangun/ meningkatkan prasarana jalan, jembatan, dan bendungan/ irigasi untuk menunjang aktivitas usaha tani dari hulu hingga hilir.
2. Meningkatkan ketersediaan sumber energi melalui pemanfaatan

3. potensi terbarukan (energi air, panas bumi), cadangan batu bara dan lainnya, serta sarana telekomunikasi dan teknologi informasi.
4. Menyediakan sarana dan prasarana air bersih serta sanitasi lingkungan pemukiman yang sehat
5. Membangun/menyediakan prasarana perhubungan darat dan laut serta jaminan konektivitas yang dapat mendukung aktivitas tata niaga, distribusi, dan bahan kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau oleh masyarakat.
6. Membangun dan mengembangkan prasarana dasar dan sarana pendukung serta konektivitas yang dapat mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe, KEK Ladong Aceh Besar, dan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang.

## **MISI 5**

### **MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA**

#### ***Strategi:***

1. Memudahkan dan menjamin warga masyarakat mendapatkan akses layanan pendidikan yang berkualitas, termasuk oleh keluarga anak yatim/kurang mampu/miskin.
2. Memperkuat kapasitas, fungsi, dan sinerjitas lembaga-lembaga pendidikan umum dan agama dalam menjalankan tugas pokok meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Aceh.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan umum yang memadai disertai peningkatan kompetensi tenaga pengajar dan kualitas lulusan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.
4. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana lembaga pendidikan dayah/pesantren, kapasitas tenaga pengajar, dan kualitas lulusan dengan penguatan nilai-nilai Ahlusunnah Wal Jama'ah bermazhab Syafi'i
5. Meningkatkan penguasaan IPTEK di Lembaga-Lembaga Pendidikan Umum, Pendidikan Advokasi, dan Dayah/Pesantren.
6. Memberi kesempatan yang luas bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah baik di bidang sosial dan politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai yang Islami.
7. Memperkuat kapasitas dan peran kelembagaan atau wadah organisasi kemasyarakatan dan profesi kaum perempuan dalam proses pembangunan daerah.

**MISI 6**  
**MENGOPTIMALKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA**  
**PEMERINTAHAN DAERAH SERTA MEMBINA STABILITAS**  
**POLITIK DAN IMPLEMENTASI HUKUM**

**Strategi:**

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur pemerintah daerah yang cakap, jujur, disiplin, amanah, bertanggung jawab, dan melayani.
2. Mewujudkan tata kelola anggaran pembangunan daerah dari semua sumber anggaran secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan memprioritaskan kepentingan publik.
3. Mengupayakan peningkatan kapasitas fiskal dengan memastikan pemanfaatan potensi unggulan daerah sebagai sumber-sumber penerimaan baru daerah.
4. Meningkatkan sistem monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembangunan daerah.
5. Membentuk lembaga riset dan pengembangan untuk mendukung proses inovasi, kreativitas, dan percepatan pembangunan Aceh.
6. Memastikan ketersediaan database yang valid, akurat, dan terintegrasi untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran.
7. Supremasi hukum dalam membentuk peraturan pelaksanaan dalam hal qanun harus sah di Aceh tanpa registrasi di Jakarta, sepanjang tidak mengesampingkan kewenangan absolut.
8. Penguatan atau penyatuan peradilan di bawah Mahkamah Syar'iyah Aceh terdiri dari Pengadilan Negeri, PTUN, Pengadilan Militer, dan membuka ruang judicial review di Mahkamah Syar'iyah Aceh.
9. Pembentukan Qanun Aceh sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
10. Pembentukan regulasi penguatan tapal batas wilayah administrasi Aceh.

**MISI 7**  
**MEMELIHARA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN**  
**EKOSISTEMNYA**

**Strategi:**

1. Meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2. Mengatur tata kelola penanganan lingkungan hidup dan ekosistemnya

dengan tetap bersandar pada kepentingan kelestarian alam dan keberlanjutan kehidupan manusia.

3. Memperkuat komitmen pemerintah dan seluruh stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan daerah berbasis kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.
4. Mengatur hak dan batas-batas pengelolaan hutan Aceh yang berpihak kepada kepentingan Aceh untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh.

# PROGRAM PRIORITAS

BIDANG	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN
<b>AGAMA</b>	Program pemantapan pelaksanaan Syariat Islam	Pembangunan Islamic Center Tgk Syech Abdurrauf atau Tgk Syiah Kuala (Pusat Tamaddun Aceh) Sertifikasi tenaga penyembelih di rumah potong dan pasar hewan
	Program peningkatan pemahaman, penghayatan. dan pengamalan Al-Quran	Uji baca Al-Quran anak Beut ureung tuha/majelis taklim (pengajian bagi lanjut usia)
	Program peningkatan sumber daya dan peran Ulama	Pertukaran ulama muda ke Australia (MEP)
	Program pembinaan dakwah dan syiar Islam	Pemantapan nilai-nilai Islam pada mualaf
		Pembinaan Masjid-Masjid ramah anak dan difabel (MRAD)
		Menjadikan Masjid sebagai pusat aktivitas warga dan media kreativitas anak
	Program pembinaan lembaga sosial keagamaan	Sertifikasi imun masjid
		Pembangunan museum haji di Sabang
	Program koordinasi dan silaturahmi Ulama-Umara	Menata dan mengembangkan kawasan Masjid Raya Baiturrahman
	Program peningkatan kualitas dan pengembangan Dayah	Muzakarah ulama setiap semester
Program peningkatan sarana dan prasarana Dayah	Peningkatan tata kelola dayah	
	Pembangunan laboratorium bahasa	
	Pembangunan perpustakaan dan digitalisasi	

	Program peningkatan mutu tenaga pendidikan Dayah	Sertifikasi guru/tenaga kependidikan
	Program pendidikan dayah dan pemberdayaan santri	Pelatihan kemampuan menulis tenaga pendidikan
	Program pengembangan lembaga ekonomi dayah	Pelatihan kemampuan menulis santri
	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Fasilitasi <i>lifestill</i> kepada para santri
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyediaan modal usaha ekonomi untuk dayah
		Pembangunan lumbung pangan di kawasan sentra produksi
		Peningkatan produktivitas lahan pertanian
		Cetak lahan sawah baru
		Penyediaan benih unggul, pupuk dan alat-alat produksi pertanian
		Pembangunan industri hasil pertanian
		Peremajaan tanaman keras (kelapa, pinang, pala)
		Pembangunan pusat logistik hasil pertanian
		Revitalisasi BUMA sebagai penyangga/penjamin harga hasil pertanian
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Revitalisasi pelabuhan laut sebagai pelabuhan ekspor hasil pertanian
		Pembangunan kawasan pertanian terpadu berbasis koperasi petani
	Program peningkatan kesejahteraan petani	Penyediaan asuransi bagi pelaku usaha tani di kawasan rawan bencana
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pembangunan industri pengolahan pakan ternak

## EKONOMI

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pembangunan rumah potong hewan bersertifikasi halal
Program pengembangan budidaya perikanan	Fasilitasi penyediaan benih, pakan, dan alat-alat produksi perikanan
Program pengembangan perikanan tangkap	Fasilitasi penyediaan alat-alat tangkap
	Penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha nelayan
	Pembangunan <i>coldstorage</i> di kawasan sentra perikanan
	Pembangunan industri pengolahan ikan
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Pembukaan pasar ekspor
	Revitalisasi pelabuhan laut sebagai pelabuhan ekspor hasil perikanan
	Pembukaan akses bagi nelayan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar
	Pembangunan kampung nelayan maju (KALAJU)
	Pemberdayaan industri kerajinan bagi masyarakat pesisir
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Pembangunan Badan Hilirisasi MIGAS Aceh (BHMA)
	Pemanfaatan jaringan gas
	Pendirian Badan Pengelolaan MINERBA Aceh (BPMINA)
Program pengembangan dan pemanfaatan energi	Penguatan Badan Pengelolaan MIGAS Aceh (BPMA)
	Pembangunan pusat data dan riset MIGAS

<p>Program pemanfaatan geologi dan sumber daya mineral</p>	<p>Pemanfaatan sumber panas bumi untuk kebutuhan energi</p> <p>Evaluasi tatakelola pemanfaatan geologi dan sumber daya mineral</p>
<p>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</p>	<p>Pembentukan asosiasi perusahaan tambang dan energi Aceh</p>
<p>Program pengembangan pemasaran pariwisata</p>	<p>Pembukaan pusat promosi wisata di kota-kota besar Indonesia dan luar negeri</p> <p>Penyelenggaraan event-event kepariwisataan secara berkala dan beragenda</p> <p>Study banding komunitas masyarakat kawasan wisata ke daerah unggul pariwisata</p> <p>Peningkatan sadar wisata ramah wisatawan di kawasan objek wisata</p> <p>Pelatihan kepariwisataan bagi pelaku usaha wisata dan masyarakat</p> <p>Pengembangan produk-produk lokal/souvenir wisata</p>
<p>Program pengembangan destinasi pariwisata halal</p>	<p>Penggalakan budaya bersih di kawasan objek wisata</p> <p>Penyediaan sarana ibadah, MCK, tempat bermain anak, air bersih di kawasan pesisir/pantai</p> <p>Pengembangan kawasan wisata yang sesuai kebutuhan media sosial</p> <p>Pemugaran situs-situs sejarah dan kerajaan-kerajaan di Aceh, seperti makam Sultan Sayyid Jamalul Alam Badrul Munir Jamalullail, Wali Nanggroe Alm. Dr. Tgk. Muhammad Hasan Di</p>

	Tiro, dan makam Tgk. Abdullah Syafii, serta makam-makam syuhada lainnya
	Pemugaran dan memperindah makam-makam Ulama besar di Aceh, seperti makam Hamzah Fansuri, Syech Abdurrauf As-Singkili, Syech Abuya Muda Wali, Abu Tanoh Abee, Abu Krueng Kalee, Syech Marhaban Bakongan, Abu Tu Min, Abu Tanoh Mirah, dan lain-lain.
	Pendampingan tenaga kerja mandiri dan pemberian modal usaha <i>start-up</i> sebagai stimulus
Program peningkatan kesempatan kerja	Fasilitasi penyaluran Tenaga Kerja Terdidik (TKT) Aceh ke luar negeri
	Pelatihan <i>lifeskill</i> dan magang kerja bagi tenaga kerja produktif
	Revitalisasi manajemen Balai Latihan Kerja (BLK)
Program peningkatan kualitas dan <i>produktivitas</i> tenaga kerja	<i>Re-upskilling</i> bagi tenaga kerja yang terkena PHK
	Pelatihan membuat konten kreatif bagi anak muda
	Pengembangan sumber-sumber baru pendapatan asli aceh
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyempurnaan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis <i>E-system</i>
	Evaluasi untuk perpanjangan dan penambahan dana otsus Aceh

Program pengembangan dan pembinaan koperasi dan UKM	Revitalisasi tatakelola dan manajemen bisnis koperasi
	Penyediaan akses pembiayaan dengan skim khusus bagi pelaku UMKM
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pengembangan KEK Lhokseumawe
	Pengembangan KIA Ladang
	Pembangunan industri pengolahan limbah menjadi pupuk organik
	Pembangunan industri pengolahan limbah medis
	Pembangunan industri minyak goreng di kawasan barat selatan dan kawasan timur
	Revitalisasi seluruh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan memanfaatkan potensi unggulan Gampong
Program pengembangan lembaga ekonomi Gampong	Pembukaan pusat promosi dan dagang di luar negeri
	Pembangunan jaringan kemitraan dengan pemilik modal/investor nasional dan luar negeri
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Revitalisasi manajemen dan tata kelola bisnis PT PEMA
	Revitalisasi manajemen dan tata kelola bisnis BPKS
	Revitalisasi manajemen dan tata kelola bisnis BPMA
	Pembentukan lembaga asuransi syariah Aceh
	Pembangunan jalan dan jembatan yang menjamin konektivitas antar wilayah
Program revitalisasi Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	
Program pembangunan jalan dan jembatan	

<p style="text-align: center;"><b>INFRA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STRUKTUR</b></p>	<p>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</p>	<p>Pembangunan jalan usaha tani dan jalan Tempat Pendaratan/Pelaelangan Ikan (TPI)</p>
	<p>Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</p>	<p>Pembangunan dan Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pencegahan Erosi</p>
<p style="text-align: center;"><b>SOSIAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BUDAYA</b></p>	<p>Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</p>	<p>Revitalisasi pelabuhan laut dan lintas penyeberangan wilayah</p> <p>Revitalisasi serta penataan kawasan Bandara Sultan Iskandar Muda.</p>
	<p>Program pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran berkarakter kearifan lokal</p>	<p>Penguatan muatan lokal dalam kurikulum pendidikan pada semua tingkat pendidikan</p>
	<p>Program pendidikan anak usia dini</p>	<p>Pendirian 1 PAUD/Gampong</p>
	<p>Program bantuan beasiswa</p>	<p>Pendirian 1 TPO/Gampong</p> <p>Pemberian asupan makanan bergizi bagi anak usia dini dan anak sekolah</p> <p>Beasiswa <i>affirmative</i> khusus anak-anak mantan kombatan pada semua tingkat pendidikan</p> <p>Beasiswa <i>affirmative</i> khusus anak-anak korban konflik pada semua tingkat pendidikan</p> <p>Beasiswa <i>affirmative</i> khusus anak-anak berprestasi pada semua tingkat pendidikan</p> <p>Pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan</p>
	<p>Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<p>Fasilitasi pengemabangan sistem belajar-mengajar berbasis <i>digital/e-learning</i></p>

	<p>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</p>	<p>Sosialisad dan edukasi publik terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak</p>
	<p>Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</p>	<p>Penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan dan anak</p>
	<p>Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</p>	<p>Pemenuhan hak perempuan dengan kasus KDRT</p>
	<p>Program pembinaan anak terlantar</p>	<p>Pemenuhan hak anak korban kekerasan</p>
<p>Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</p>		<p>Pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan untuk <b>Inong Balee</b> di Gampong</p> <p>Pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan untuk <b>Dara Duson</b> di Gampong</p> <p>Pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan untuk <b>Poma</b> di Gampong</p> <p>Pendampingan hukum dan pendampingan psikologis bagi anak dan perempuan korban kekerasan</p> <p>Pembangunan rumah aman (<i>safety house</i>) untuk anak korban kekerasan seksual</p> <p>Inisiasi kelas <i>parenting</i> terkait pola asuh positif</p> <p>Penyediaan rumah singgah bagi anak terlantar</p> <p>Pelatihan <i>lifeskill</i> disertai penyediaan kebutuhan hidup dan akses pembiayaan bagi fakir miskin untuk membuka usaha</p> <p>Pelatihan vokasional bagi komunitas adat terpencil (KAT) sesuai kebutuhan</p> <p>Pembukaan akses informasi dan ilmu pengetahuan bagi komunitas adat terpencil</p>

		Pendampingan hukum dan advokasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Pendidirian pusat layanan anak berkebutuhan khusus	
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pelatihan <i>lifeskill</i> dan jiwa kewirausahaan pemuda	
Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Penyediaan akses pembiayaan bagi pemuda yang ingin membuka usaha	
Program pembinaan dan pemasaran olahraga	Evaluasi tatakelola dan manajemen keolahragaan	
	Penggalakkan budaya sadar olahraga di tengah-tengah masyarakat	
	Penyediaan sarana dan fasilitas keolahragaan	
	Penguatan kapasitas dan peran Lembaga Wali Nanggroe dalam pembinaan kekhususan Aceh	
	Penyusunan sistem/metode monitoring dan evaluasi pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh	
Program kekhususan Aceh	Penyusunan pertimbangan Wali Nanggroe dalam rangka implementasi MoU Helsinki	
	Pembinaan lembaga adat	
	Penyusunan standarisasi adat	
	Penguatan pemerintahan mukim	
Program pengelolaan kekayaan budaya	Revitalisasi kawasan benteng Indra Patra, masjid Indra Puri, dan situs Indra Purwa.	

	<p>Penataan kawasan situs-situs peninggalan Jepang di Sabang serta daerah lainnya</p> <p>Rekonstruksi lokasi Kerajaan Kuno Lamuri</p> <p>Pembukaan pusat kebudayaan Aceh di luar negeri</p> <p>Penyelenggaraan kongres kebudayaan secara berkala dan teragenda</p>
Program pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan	<p>Fasilitas sarana dan prasarana untuk aktivitas kebudayaan</p> <p>Fasilitas sarana dan prasarana untuk pembinaan dan pelestarian adat istiadat</p> <p>Pemberdayaan dan fasilitas komunitas pembinaan adat di Gampong</p> <p>Penguatan dan penyediaan sarana dan prasarana peradilan adat</p>
Program pelestarian dan pembinaan adat istiadat	
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	<p>Penyediaan pusat rehabilitasi dan rumah singgah bagi penyandang masalah sosial</p> <p>Penyediaan ambulance terpadu di kawasan terpencil dan tertinggal</p>
Program pelayanan krisis kesehatan dan ambulance terpadu	<p>Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)</p> <p>Peningkatan kapasitas tenaga para medis dan non medis</p> <p>Penempatan ahli gizi dan ahli jiwa di tingkat mukim</p>
Program pelayanan medis	<p>Penyediaan rumah singgah bagi keluarga pasien kurang mampu sesuai kebutuhan</p>
Program pelayanan penunjang medis/non medis	<p>Pembangunan pusat riset obat-obat traditional Aceh</p>
Program pengembangan obat asli Indonesia	

<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAHAN POLITIK DAN HUKUM</b></p>	Program perbaikan gizi masyarakat	Penyediaan makanan bergizi untuk lanjut usia
	Program pengembangan lingkungan sehat	Penyediaan aplikasi <i>framework</i> berbasis digital
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa dan puskesmas dan jaringannya	Rehabilitasi holistik untuk pasien RSJ
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Pembangunan pusat rehabilitasi pengguna NAPZA
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Penyediaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan
	Penataan administrasi kependudukan	Pendistribusian susu murni untuk balita
		Konsultasi kesehatan gratis bagi ibu hamil
	Program pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan aparatur	Penyediaan asupan gizi bagi ibu hamil dan anak
		Pembangunan database kependudukan Aceh
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Pembuatan identitas tunggal kependudukan Aceh (Aceh Single ID)
Pembinaan mentalitas aparatur yang tidak berprilaku koruptif dan manipulatif		
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam tatakelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel	
Program peningkatan kapasitas pelayanan informasi, komunikasi, sosialisasi dan hubungan masyarakat serta instansi terkait	Beasiswa untuk aparatur yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi	
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Gampong	Penguatan kapasitas literasi digital untuk perangkat Desa	
	Pelatihan sumber daya manajerial dan tata kelola Pemerintahan Gampong	

Program peningkatan Imum Mukim dan kelebagaannya	Pelatihan sumber daya manajerial dan tata kelola Pemerintahan Mukim
	Pembangunan sarana dan prasarana Mukim di seluruh Aceh
Program pengembangan dan pemberdayaan peradilan syariah	Evaluasi regulasi terkait dengan lembaga Mukim
	Peningkatan kapasitas hakim-hakim syariah
	Beasiswa untuk hakim-hakim syariah
	melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi
	Studi banding hakim-hakim syariah ke negara-negara berbasis hukum islam
	Bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Mahkamah Syariah
	Penyuluhan dan sosialisasi serta edukasi peradilan syariah kepada masyarakat
	Fasilitasi data dan riset hukum syariah serta publikasi
	Digitalisasi arsip-arsip kuno dan bersejarah
	Menyelenggarakan <i>international peace camp</i>
Program pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga Internasional	Melakukan diplomat <i>briefing</i> setiap semester
	Pelatihan kepemimpinan dan demokrasi yang sehat
	Pelatihan kepemimpinan politik perempuan
	Pelatihan <i>soft skill</i> untuk mantan kombatan dan korban konflik
Program pendidikan politik masyarakat ( <i>Civic Education</i> )	Pembangunan situs-situs konflik Aceh
Program penyediaan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	
Program konsolidasi perdamaian Aceh ( <i>Peace Consolidation</i> )	

	<p>Program peningkatan kapasitas lembaga paska konflik</p> <p>Program perencanaan tata ruang</p> <p>Program pengendalian banjir</p>	<p>Membangun museum DR. Tgk. Hasan Bin Muhammad Di Tiro</p> <p>Kajian dan penelitian terhadap sejarah perdamainan Aceh</p> <p>Pelatihan dan <i>study banding</i> ke negara-negara bekas konflik</p> <p>Evaluasi tata ruang induk</p> <p>Membangun Badan Pengelolaan Hutan Aceh (BPHA)</p> <p>Normalisasi sungai dan anak sungai di kawasan rawan banjir</p> <p>Mencegah aktivitas <i>illegal logging</i></p> <p>Menggalakkan reboisasi di 23 Kab/Kota</p> <p>Membangun kanal-kanal banjir di kawasan rawan banjir</p> <p>Pembukaan kawasan pemukiman baru yang ramah lingkungan</p> <p>Evaluasi tapal batas di perbatasan Aceh</p> <p>Evaluasi perizinan dan pemanfaatan lahan perkebunan</p> <p>Evaluasi tatakelola ekosistem pesisir dan laut</p> <p>Menggalakkan budaya bersih di kawasan pesisir/pantai</p> <p>Menyediakan sarana ibadah, MCK, tempat bermain anak, air bersih di kawasan pesisir/pantai</p> <p>Budidaya hutan bakau di kawasan pesisir</p>
<h2 style="text-align: center;">LINGKUNGAN HIDUP</h2>	<p>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</p> <p>Program pengembangan wilayah perbatasan</p> <p>Program penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</p> <p>Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut</p>	

	<p>Mencegah pencemaran laut dan lingkungan pesisir, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi</p> <p>Melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan</p> <p>Mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui peningkatan kerjasama linier disemua tingkatan</p> <p>Mengatur dan mengevaluasi sistem penangkapan ikan dan menghentikan <i>illegal fishing</i></p> <p>Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset disertai transfer teknologi kelautan</p> <p>Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan kelautan dan sumberdayanya</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# BIODATA CALON GUBERNUR

## H. Muzakir Manaf

**H. Muzakir Manaf**, biasa disapa Mualem adalah seorang Panglima Perang pada masa konflik dulu. Secara terminologi Aceh, gelar Mualem itu sendiri disematkan kepada sosok yang memiliki pengetahuan tinggi dalam dunia kemiliteran serta mampu mentransfer ilmu tersebut kepada pasukan yang dipimpinya. Mualem sendiri pernah menjabat sebagai Panglima GAM menggantikan Abdullah Syafie yang wafat pada tanggal 22 Januari 2002.

Setelah Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sayap militer dibubarkan dan kemudian dibentuklah Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai wadah transisi para mantan kombatan menjadi masyarakat biasa. Sejak pertama sekali KPA dibentuk pada tahun 2005 hingga saat ini Mualem menjabat sebagai Ketua KPA sekaligus juga Ketua Umum Partai Aceh sejak tahun 2007 hingga sekarang.

Di masa damai saat ini, orang Aceh masih juga memanggil beliau dengan laqab itu. Tentu saja tidak dikaitkan dengan soal militer tetapi sebagai sapaan kehormatan, tidak hanya bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tetapi juga oleh seluruh masyarakat Aceh lainnya.

Mualem lahir di Seuneudon, Aceh Utara pada tahun 1964. Ia sudah terlibat dalam perjuangan Aceh sejak usia muda. Sejak 1986 hingga 1989 bersama beberapa pemuda Aceh pilihan lainnya, Mualem dikirim ke Libya untuk mengikuti Pendidikan militer di Camp Tajura. Disana juga ia juga pernah dipercayakan menjagi pengawal Muammar Qadafi

Ketika kembali ke Aceh, sama seperti kombatan GAM lainnya, Mualem bergerilya dari satu hutan ke hutan lainnya. Keberadaannya begitu sulit dideteksi oleh aparat keamanan. Kala itu, aparat keamanan pernah beberapa kali mengumumkan bahwa Muzakir Manaf telah tewas, namun nyatanya Mualem kemudian muncul di tempat lain dalam kondisi sehat wal afiat.

Kini perjuangan bersenjata telah usai. Tapi perjuangan politik untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh terus dilakukan. Lewat Partai Aceh Mualem mengajak masyarakat untuk ikut Bersama-sama dalam

barisan perjuangan tersebut. Mari semua Bersama kami , Partai Aceh tidak membeda-bedakan suku bangsa” Kata Muzakir Manaf.

Pada musim Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Aceh 2024, Partai Aceh dengan perolehan kursi terbanyak atau 20 kursi (24.7%) akan mengusung H. Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh periode 2024 – 2029 berpasangan dengan Fadhlullah, SE, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra di Aceh.

### **BIODATA SINGKAT**

Nama : H. Muzakir Manaf  
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Timur, 03 April 1964  
Tempat Tinggal : Banda Aceh  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Sudah Kawin

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- SDN Seunuddon Kabupaten Aceh Utara
- SMP Negeri Idi Kabupaten Aceh Timur
- SMA Negeri Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara
- Pelatihan Militer di Camp Tajura, Libya 1986-1989

### **RIWAYAT ORGANISASI**

- Anggota Pasukan Gerakan Aceh Merdeka 1986-2005
- Panglima Wilayah Pase Gerakan Aceh Merdeka 1998-2002
- Wakil Panglima Negara Gerakan Aceh Merdeka 1998-2002
- Panglima Negara Gerakan Aceh Merdeka 2002-2005
- Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) 2005-sekarang
- Ketua Umum Partai Aceh (PA) 2007-sekarang

# **BIODATA CALON WAKIL GUBERNUR**

**H. Fadhlullah, S.E**

## **BIODATA SINGKAT**

Nama : Fadhlullah, S.E  
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Simpang, 15 Juni 1981  
Tempat Tinggal : Desa Blang Baroh, Glumpang Baro, Pidie  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Sudah Kawin

## **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- SD Negeri Aron, Glumpang Tiga 1987-1993
- MTs Swasta Jeumala Amal Lueng Putu, Pidie 1993-1996
- MA Darussa'adah, Glumpang Tiga 2005-2008
- S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Banda Aceh 2009-2017

## **RIWAYAT ORGANISASI**

- Ketua Organisasi Santri Dayah Jeumala Amal, Aceh 1993-1996
- Panglima Organisasi Gerakan Aceh Merdeka Wilayah Pidie 1999-2004
- Wakil Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Pidie 2005-2012
- Anggota Himpunan Pengusaha Migas Aceh 2009-Sekarang
- Bendahara Organisasi Kepemudaan Mahasiswa Pancasila Kabupaten Pidie 2010-2012
- Wakil Ketua KADIN Daerah Kabupaten Pidie 2011-2016
- Ketua KNPI Kabupaten Pidie 2012-2016
- Bendahara DPD Partai Gerindra Aceh 2013-2022
- Ketua DPD Partai Gerindra Aceh 2022- Sekarang



**H. MUZAKIR MANAF**  
Calon Gubernur Aceh



**H. FADHLULLAH, SE**  
Calon Wakil Gubernur Aceh

**ACEH ISLAMI,  
MAJU, BERMARTABAT,  
DAN BERKELANJUTAN**